

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengembangan sistem persenjataan nuklir pada dasarnya telah melalui proses yang sangat panjang yang dimulai sejak berakhirnya Perang Dunia II dengan mengikuti dinamika teknologi industri dan situasi politik internasional yang ditandai dengan Perang Dingin. Perang Dingin merupakan era persaingan kekuatan militer antara dua kubu yaitu Blok Timur dan Blok Barat. Blok Timur dipimpin oleh Uni Soviet dengan persekutuannya yang diberi nama Pakta Warsawa, sedangkan Blok Barat dipimpin oleh Amerika Serikat yang tergabung dalam persekutuan bernama NATO.

Sistem persenjataan nuklir menjadi senjata yang dianggap paling canggih yang selalu diandalkan oleh kedua belah pihak sehingga ukuran kekuatan militer suatu negara sering dilihat dari seberapa banyak hulu ledak nuklir yang dimiliki negara bersangkutan. Upaya peredaan ketegangan akibat perlombaan kekuatan militer terus dilakukan oleh kedua belah pihak maupun negara-negara sekutunya. Berbagai kesepakatan penurunan ketegangan telah dibuat, salah satunya adalah ditandatanganinya *Anti Ballistic Missile Treaty Tahun 1972* oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan ambruknya Negara Uni Soviet telah memunculkan Amerika Serikat sebagai satu-satunya Negara di dunia yang memegang status super power dimana Amerika Serikat sebagai

Pada kawasan-kawasan tersebut, militer Amerika Serikat berperan sebagai penyeimbang kekuatan militer dengan Negara-negara lain sehingga tidak terjadi perang antar Negara di kawasan tersebut.

Peran superpower Amerika Serikat di dunia internasional semakin menonjol setelah serangan teroris 11 September 2001 terhadap gedung WTC (*World Trade Center*) di New York yang menewaskan lebih dari 2000 orang. Serangan ini menunjukkan lemahnya system pertahanan dan keamanan Amerika Serikat serta besarnya ancaman terorisme terhadap keamanan dunia, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Sejak serangan tersebut, Amerika Serikat mengubah system pertahanannya dari *mutual assured destruction* menjadi *the deterrence based on offensive defensice measures*. Kebijakan strategi keamanan Amerika Serikat tersebut secara jelas tertuang dalam National Security Strategy 2002 (NSS 2002).

Dua hal pokok yang terdapat dalam kebijakan NSS 2002 adalah, pertama, keharusan adanya demokratisasi di seluruh dunia yang dapat mendukung kepentingan Amerika Serikat melalui perdagangan bebas dan pertumbuhan ekonomi global. Kedua, pilihan Amerika Serikat untuk melakukan aksi pendahuluan (*preemptive actions*) guna melawan ancaman bagi keamanan nasional. Karena itu, apabila ditemukan adanya ancaman, maka Amerika Serikat merasa berhak untuk menyerang terlebih dulu terhadap pihak yang dianggap mengancam kepentingan Amerika Serikat. Respon atas kebijakan tersebut adalah dengan mengeluarkan kebijakan pengembangan system pertahanan rudal secara efektif atau lebih dikenal dengan *Ballistic Missile Defense (Sistem Pertahanan Peluru Kendali)*. *Ballistic Missile*

Defence memungkinkan penyerangan suatu negara dari jarak jauh melalui pengiriman peluru kendali. Sedangkan peluru kendali yang daya jangkauannya mencapai ribuan kilometer dapat diisi dengan hulu ledak nuklir, sehingga sangat berbahaya bagi negara-negara lain.

Peluru kendali balistik adalah peluru kendali yang terbang dalam ketinggian sub-orbit melalui jalur balistik. Rudal balistik hanya dapat dikendalikan dalam tahap peluncurannya saja. Rudal balistik pertama adalah roket V-2 yang dikembangkan oleh Nazi Jerman antara 1930-an dan 1940-an berdasarkan perintah dari Walter Dornberger. Uji coba V-2 yang pertama sukses adalah pada 3 Oktober 1942 dan mulai dioperasikan pada 6 September 1944 melawan Paris diikuti dengan serangan terhadap London 2 hari kemudian. Sampai berakhirnya perang pada Mei 1945, lebih dari 3000 V-2 telah ditembakkan.

Peluncuran rudal balistik terdiri dari 3 tahap yaitu tahap peluncuran, tahap terbang bebas yang menghabiskan sebagian besar waktu terbang rudal dan tahap memasuki kembali atmosfer bumi. Rudal balistik dapat diluncurkan dari lokasi tetap atau kendaraan peluncur (TEL, kapal, pesawat dan kapal selam). Tahap peluncuran dapat berkisar dari sekian puluh detik sampai beberapa menit dan dapat terdiri sampai tiga tingkat roket. Ketika berada di sub-orbit dan tidak ada lagi dorongan, rudal memasuki tahap terbang bebas. Untuk mencapai jangkauan yang jauh, rudal balistik umumnya diluncurkan sampai ke sub-orbit. Peluru kendali balistik antar benua dapat mencapai

Rudal balistik bervariasi menurut penggunaan dan jangkauannya dan umumnya dibagi ke dalam kategori menurut jangkauan, yaitu:

1. Peluru kendali balistik jarak pendek (*short-range ballistic missile* atau SRBM) memiliki jangkauan kurang dari 1.000 km. Rudal jenis ini memiliki hulu ledak konvensional.
2. Peluru kendali balistik jarak menengah (*medium-range ballistic missile* atau MRBM) memiliki jangkauan antara 1.000 sampai 2.500 km.
3. Intermediate-range ballistic missile atau IRBM memiliki jangkauan antara 2.500 sampai 3.500 km.
4. Peluru kendali balistik sub-benua (*sub-continental ballistic missile* atau SCBM).
5. Peluru kendali balistik antar benua (*intercontinental ballistic missile* atau ICBM) memiliki jangkauan lebih besar dari 3.500 km.
6. Peluru kendali balistik berbasis kapal selam (*submarine-launched ballistic missile* atau SLBM).

Misil balistik jarak menengah dan pendek sering disebut sebagai misil balistik taktis atau teatrikal. Misil balistik jarak jauh umumnya dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir karena kapasitas muatnya sangat terbatas untuk peledak konvensional agar efisien. Menggunakan misil balistik dengan kemampuan jangkauan lebih jauh dari jarak target menjadi salah satu strategi untuk menyulitkan pertahanan. Contohnya, sebuah misil dengan jangkauan 3.000 km yang ditembakkan untuk target yang berjarak hanya 500 km dapat mencapai ketinggian yang lebih tinggi yaitu sekitar 1.200 km dengan

demikian misil tersebut akan menerjang target dengan kecepatan lebih dari 6 km/detik.

Uji coba komponen balistik telah dimulai sejak tahun 1999 meskipun waktu itu masih terikat oleh ABM Treaty 1972 yang membatasi pengembangan peluru kendali balistik. Guna melancarkan upaya pengembangan BMD, Pemerintah Bush keluar dari ABM 1972 dan hingga sekarang terus mengembangkan BMD. Pengembangan BMD merupakan proyek yang sangat mahal apabila didasari oleh adanya ancaman senjata pemusnah massal yang dituduhkan dimiliki oleh Iraq, Iran, Libya dan Korea Utara.

Sikap Amerika Serikat mengembangkan *Ballistic Missile Defence* telah melanggar kesepakatan internasional berupa *Anti Ballistic Missile Treaty* (ABM) 1972 yang ditandatangani oleh USA dan Uni Soviet pada tanggal 26 Mei 1972. Kesepakatan dalam ABM 1972 mengatur bahwa Amerika dan Rusia (negara bekas Uni Soviet) dilarang mengembangkan sistem pertahanan perluru kendali (BMD) dan akan mengurangi senjata nuklir strategis masing-masing sampai hanya sepertiganya.<sup>3</sup> ABM Treaty 1972 dibuat sebagai upaya menghentikan Perang Dingin antara Blok Timur (Uni Soviet dan Sekutunya) dan Blok Barat (Amerika Serikat dan Sekutunya).<sup>4</sup> ABM Treaty dibuat dengan semangat untuk menciptakan perdamaian dunia dengan meninggalkan pendekatan kekuatan militer dalam penyelesaian masalah-masalah

---

<sup>3</sup> [www.veonews.com](http://www.veonews.com), diakses tanggal 28 Maret 2007

<sup>4</sup> Directorate-General for Research, *The Principal International Arms Control Convention,*

internasional.

Pengembangan BMD jelas merupakan pelanggaran ABM 1972. Lebih dari itu, pelanggaran terhadap ABM 1972 bertentangan dengan semangat untuk meninggalkan kekuatan militer dalam mengupayakan perdamaian dunia.<sup>5</sup> Bush mengajukan argumentasi bahwa ABM 1972 sudah tidak lagi dapat melindungi rasa aman warga Amerika Serikat karena ABM 1972 dibuat untuk menghentikan Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.<sup>6</sup> Sekarang ini, ancaman justru datang dari jaringan teroris yang didukung oleh Negara-negara teroris seperti Irak, Afganistan, Iran, dan sebagainya. Ketika Amerika Serikat tetap meneruskan langkahnya mengembangkan BMD dan menyatakan keluar dari ABM Treaty pada tahun 2002 telah menunjukkan arogansi Amerika Serikat sebagai kekuatan unipolar. Demikian juga, ketika kemudian Amerika Serikat menjalankan aksi sepihak dengan menyerang negara-negara yang dianggap musuh seperti Afganistan dan Irak, tidak ada satupun kekuatan dunia yang berhasil menghalanginya. Keadaan ini menunjukkan kuatnya posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan unipolar.

Ambisi pengembangan BMD oleh Bush tampak pada peningkatan anggaran militer. Pada *Global Security* milik *Union of Concerned Scientist*, sebuah lembaga swasta di Amerika Serikat menuliskan:

The United States is currently attempting to develop several components of a missile defense system designed to protect U.S. territory from attack by long-range (strategic) ballistic missiles. Under the Bush administration, missile defenses have received \$7 billion to \$9 billion annually, and the FY05 budget request is more than \$10

---

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> [www.globalsecurity.org/us/doc/0206/doc06.htm](http://www.globalsecurity.org/us/doc/0206/doc06.htm) diakses tanggal 28 Maret 2007

billion.<sup>7</sup>

Walaupun Amerika Serikat selalu menyebutkan demi keamanan dan perdamaian dunia sebagai alasan pengembangan kekuatan militernya, banyak Negara-negara yang tidak sepakat dengan sikap Amerika Serikat mengembangkan BMD. Kantor Berita Iran mengemukakan bahwa AS menggunakan kebijakan militerisme gaya era perang dingin, sedangkan mayoritas negara Eropa memandang era perang dingin telah usai, cara-cara pendekatan politik dan menjalin hubungan yang lebih baik adalah metode yang paling tepat untuk menghindari ancaman keamanan. Berbeda dengan AS, bagi Eropa, Korea Utara, Cina dan Iran bukanlah ancaman. Apalagi Iran saat ini masih belum memiliki teknologi pembuatan rudal antar benua. Dengan demikian, sikap Amerika Serikat menempatkan sistem pertahanan anti rudal di Eropa Timur sama sekali tidak menguntungkan Eropa, sebab hanya AS-lah yang memiliki kepentingan di balik program tersebut.<sup>8</sup>

Apapun motifnya, keputusan Amerika Serikat mengembangkan BMD telah mendorong Negara-negara lain untuk melakukan langkah yang sama guna mengimbangi berbagai kemungkinan politik dan keamanan yang ditimbulkan. Terlebih lagi, Amerika Serikat berencana menempatkan rudal-rudalnya di berbagai lokasi di wilayah Negara sekutunya, termasuk Polandia dan Ceko Slowakia yang merupakan bekas Negara sekutu Uni Soviet yang sekarang sudah bubar. Jendral Nikolai Solovtso, Komandan Pasukan Peluru

---

<sup>7</sup> ... ..  
<sup>8</sup> ... ..

Kendali Rusia mengatakan bahwa Polandia dan Ceko akan menjadi sasaran potensial apabila kedua negara ini bergabung dalam program pertahanan peluru kendali Amerika.<sup>9</sup> Menhan Rusia mengancam akan menempatkan sistem pertahanan yang sama di negara-negara tetangganya, jika AS merusak perimbangan kekuatan di kawasan. Inavof juga mengungkapkan keputusan pihaknya untuk mengalokasikan 40 % bujet pertahanan untuk program pengembangan peluru kendali. Pernyataan itu dikukuhkan oleh Presiden Vladimir Putin yang mengatakan bahwa Moskow harus mengimbangi kekuatan militer AS.<sup>10</sup>

Negara-negara Iran, Pakistan, Rusia dan Cina terdorong untuk melakukan pengembangan system peluru kendali. Tidak menutup kemungkinan, Rusia juga akan keluar dari kesepakatan ABM 1972 yang ditandatangani guna meredam perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur pada waktu itu. Reaksi Negara-negara tersebut di atas sudah pasti berada dalam perhitungan politik Amerika Serikat yang saat ini menikmati posisi dirinya sebagai super power tunggal.

Ambisi Bush untuk mengembangkan system pertahanan peluru kendali sebenarnya telah tampak sejak sebelum peristiwa 11 September 2001. Laporan dari Komisi Hubungan Luar Negeri Inggris mengemukakan bahwa Bush pada masa kampanye tahun 2000 pernah mengatakan:

We need a new framework that allows us to build missile defenses to counter the different threats of todays world. To do so, we must move

---

<sup>9</sup> www.voanews.com, diakses tanggal 12 Maret 2007.

<sup>10</sup> Opcit, www.irib.ir. Diakses tanggal 20 Maret 2007

beyond the constraints of the 30-year-old ABM Treaty. This treaty does not recognize the present, or point us to the future. It enshrines the past. No treaty that prevents us from addressing today's threats, that prohibits us from pursuing promising technology to defend ourselves, our friends and our allies is in our interests or in the interests of world peace. This new framework must encourage still further cuts in nuclear weapons. Nuclear weapons still have a vital role to play in our security and that of our allies. We can, and will, change the size, the composition, the character of our nuclear forces in a way that reflects the reality that the Cold War is over.<sup>11</sup>

Pernyataan Bush tersebut menunjukkan bahwa serangan teroris 11 September 2001 hanyalah momentum yang ditunggu-tunggu pemerintah Bush guna mendapatkan legitimasi public terhadap keinginannya mengembangkan system pertahanan yang berbasis pada teknologi yang secara khusus diwujudkan dalam bentuk pengembangan BMD. Berangkat dari fakta inilah, penelitian ini menarik guna mengungkap kepentingan apa di balik upaya pengembangan BMD tersebut.

## B. Perumusan Masalah

Uraian latar belakang masalah di atas mengarah pada kontradiksi antara komitmen Amerika Serikat untuk membatasi pengembangan senjata nuklir sebagaimana telah disepakati dalam ABT 1972 dan kenyataan Amerika Serikat tetap bertekad mengembangkan BMD. Padahal, serangan terorisme yang menjadi alasan pembenar atas pengembangan BMD telah dapat diredam di berbagai negara. Permasalahan pokok yang diteliti yaitu: *mengapa*

---

<sup>11</sup> "Speech by President George W. Bush at the National Defense University", Washington, 1 11 2001. See American Institute web site at <http://www.americaninstitute.org/bush1.htm>

*pemerintah Bush bersikeras untuk mengembangkan sistem pertahanan Peluru Kendali (BMD) dalam sistem pertahanan nasional Amerika Serikat pasca 11 September 2001 ?*

### C. Landasan Teori

#### **Teori Pengambilan Keputusan**

Permasalahan mengapa Amerika Serikat mengembangkan BMD (Ballistic Missile Defence) dikaji dengan menggunakan teori pengambilan keputusan. Teori tersebut digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan suatu analisis sehingga menghasilkan suatu pengetahuan mengenai keputusan Amerika Serikat mengembangkan BMD.

Menurut Snyder, Bruck, dan Sapin, pengertian pembuatan keputusan (*decision making*) adalah sebagai suatu rangkaian kegiatan yang menghasilkan pemilihan sebarang tindakan dari seperangkat alternatif tindakan secara sosial, yang dimaksudkan untuk menghasilkan keadaan khusus di masa mendatang yang dibayangkan oleh pembuat keputusan.<sup>12</sup>

Graham Allison mengemukakan bahwa teori pengambilan keputusan dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan politik luar negeri suatu negara. Salah satu teori pengambilan keputusan yang digunakan adalah *the rational-actor model*. Menurut model ini, kebijakan dikeluarkan berdasarkan logika atau rasionalitas untuk mencapai tujuan atau kepentingan pemerintah.

---

<sup>12</sup> Richard C. Snyder, H. W. Bruck, dan Burton Sapin, *Foreign Policy Decision-Making: An*

Kebijakan atau tindakan-tindakan selalu dikaitkan dengan sejumlah keuntungan-keuntungan sehingga setiap keputusan yang diambil adalah hasil dari berbagai alternatif keputusan. Aktor pengambil keputusan biasanya terpanggil untuk mengkaitkan keuntungan-keuntungan tersebut dengan upaya mencapai kepentingan-kepentingan nasional.<sup>13</sup>

Allison mengingatkan bahwa *rational-actor* model ini tidak selalu dapat mengupas tuntas masalah politik luar negeri yang sangat kompleks. Pengambilan keputusan tidak dapat disederhanakan hanya masalah rasionalitas para aktor pengambil keputusan karena mereka terikat pula pada aturan perundang-undangan atau prosedur birokrasi di negaranya. Sebaliknya, pengambilan keputusan oleh birokrasi tidak hanya dipengaruhi oleh perilaku birokrasi seperti tampak pada rutinitas birokrasi atau organisasi pemerintahan yang ada di negara bersangkutan, tetapi juga ditentukan oleh para pemimpin pemerintahan sebagai aktor-aktor pengambilan keputusan. Besarnya peran pemimpin sebagai aktor pengambil keputusan menunjukkan bahwa suatu proses pengambilan keputusan juga harus dilihat dari proses politik yang terjadi di dalam negeri negara bersangkutan. Dengan demikian, kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam pengembangan BMD harus dikaji dari rasionalitas para pemimpinnya sebagai aktor yang aktif dalam proses pengambilan keputusan.<sup>14</sup>

Para pembuat keputusan (*decision maker*) adalah orang-orang yang

---

<sup>13</sup> James E. Dougherty & Robert L. Pfaltzgraff, Jr, *Contending Theories of International*

merupakan pejabat pemerintah atau pejabat negara yang memiliki wewenang *de jure* untuk membuat keputusan. Para pembuat keputusan ini kemudian bertindak atas nama negara, sehingga tindakan mereka (para pembuat keputusan) sering disebut sebagai tindakan negara. Pengambilan keputusan oleh para *decision maker* dipengaruhi oleh banyak faktor. Tiga faktor yang mempengaruhi tindakan negara menurut Snyder, Bruck, dan Sapin<sup>15</sup>:

1. Latar eksternal (*external setting*), yang merujuk pada berbagai kondisi dan faktor yang berada di luar batas-batas suatu negara, seperti aksi dan reaksi dari negara lain (pembuat keputusan mereka), masyarakat (*societes*) untuk siapa mereka bertindak, dan dunia fisik.
2. Latar internal, adalah masyarakat kepada siapa para pejabat membuat keputusan. Memuat cara masyarakatnya diorganisir dan berfungsi, karakter dan perilaku penduduknya, dan habitat fisiknya, juga terdiri dari orientasi-orientasi nilai-nilai umum yang pokok, pola-pola pokok kelembagaan, ciri pokok organisasi sosial, pembedaan dan pengkhususan peran, fungsi-fungsi dan jenis-jenis kelompok, dan proses-proses sosial yang relevan seperti proses pembentukan pendapat umum, proses sosialisasi orang dewasa, dan proses politik.
3. Proses pembuatan keputusan itu sendiri meliputi 3 unsur, yaitu:
  - a. lingkup kompetensi (*spheres of competence*), merupakan karakteristik suatu organisasi atau unit pembuat keputusan.

---

<sup>15</sup> Ibid, hlm 38-43

- b. Komunikasi dan informasi (*communication and information*), yaitu jaringan komunikasi dalam suatu organisasi.
- c. Motivasi (*motivation*), yaitu tujuan keseluruhan unit pembuat keputusan, norma-norma dan nilai-nilai yang dianut mereka dalam unit, dan nilai-nilai masyarakat.

Keputusan Amerika Serikat untuk mengembangkan BMD dengan sendirinya akan meningkatkan kemampuan Amerika Serikat untuk menekan, mempengaruhi, dan mendapatkan otoritas atau kewenangan di dunia internasional. Roger Hilsman mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan di Amerika, adalah Presiden, para Penasehat Utama (*top adviser*), para pejabat yang lebih rendah (*lower-level officials*) khususnya dalam Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri, Kongres, Partai-partai dan Kelompok-kelompok kepentingan, dan Pendapat Umum.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin dalam "*Congress, Bureaucracy, and Public Policy*", Homewood, III: Dorsey, 1976, hlm. 17, para pembuat keputusan yang berperan dalam keputusan keamanan terdiri dari *president, executive agencies, congress, interest groups, public opinion*<sup>17</sup>.

Berdasarkan teori di atas, keputusan Amerika Serikat untuk mengembangkan BMD harus dikaji dari peran aktor pengambil keputusan di

---

<sup>16</sup> John C. Spanier, *Games Nations Play*, Congressional Quarterly Inc., Washington D. C., 1987, hlm 12.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 524

Amerika Serikat di antaranya adalah presiden, parlemen, kongres, senat dan organisasi-organisasi sosial di Amerika Serikat.

Berdasarkan teori pembuatan keputusan menurut Allison<sup>18</sup> dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menurut Snyder, Bruck, dan Sapin<sup>19</sup> serta tipe-tipe pengambilan keputusan menurut Spanier<sup>20</sup> dapat diambil kesimpulan bahwa keputusan Amerika Serikat mengembangkan BMD tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan rasionalitas para aktor pemimpin Amerika Serikat.

Berangkat dari teori di atas, keputusan Amerika Serikat mengembangkan BMD merupakan suatu keputusan para aktor pemimpin Amerika Serikat yang didasari oleh perubahan situasi internal dan eksternal. Perubahan situasi internal ditandai oleh keinginan Amerika Serikat untuk mengambil peran lebih besar di bidang keamanan internasional secara lebih luas. Selama masa pemerintahan Bill Clinton, Amerika Serikat lebih banyak terfokus pada masalah-masalah dalam negeri. Oleh kelompok neo konservatif yang menjadi pendukung George W. Bush, apa yang dilakukan Bill Clinton kurang memperhatikan kepentingan nasional Amerika Serikat untuk tetap mendominasi peran-perannya di dunia internasional, baik di bidang ekonomi,

---

<sup>18</sup> Allison menjelaskan bahwa rasionalitas para actor pengambilan keputusan tidak mungkin lepas dari pengaruh mereka untuk memperkuat legitimasi atau dukungan politik bagi mereka untuk tetap berkuasa. Legitimasi tersebut akan didapatkan apabila selalu bersandar pada tujuan nasionalnya.

<sup>19</sup> Dijelaskan bahwa latar eksternal berupa situasi internasional atau sikap negara lain, dan latar internal berupa masyarakat dimana keputusannya harus dipertanggungjawabkan pasti mempengaruhi aktor dalam proses pengambilan keputusan.

<sup>20</sup> Interpretasi dan logika aktor pengambil keputusan terhadap suatu masalah akan menggiring para aktor untuk menilai apakah suatu masalah masuk dalam kategori keamanan, dalam negeri atau masalah krisis,

teknologi, maupun politik. Penguatan pertahanan keamanan menjadi kebutuhan pokok untuk melindungi keamanan dan stabilitas dunia internasional.

Perubahan situasi eksternal tersebut di antaranya adalah meningkatnya pengembangan peluru kendali balistik oleh negara-negara di luar penandatanganan ABT 1972 seperti Irak, Iran, Korea Utara, Pakistan, India dan lain-lain. Para policy maker di dalam negeri Amerika Serikat menganggap perlu adanya pengembangan BMD sebagai respon atas perubahan situasi internal dan eksternal di atas. Para *policy maker* di dalam negeri Amerika Serikat ini tidak lepas dari pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam negeri termasuk kekuatan loby Yahudi yang cukup kuat dalam lingkaran pemerintahan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush. Keberadaan kelompok Neo-Konservatif dalam percaturan politik AS, yang kini menjadi sayap utama di Partai Republik sebagai pendukung George Bush dalam pemilu kepresidenan AS pada tahun 2000 ikut mempengaruhi pengambilan keputusan Presiden Amerika Serikat ini.<sup>21</sup>

#### D. Hipotesis

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan teorisasi di atas, maka penulis sampai pada suatu hipotesis bahwa pemerintah Amerika Serikat mengambil keputusan untuk mengembangkan sistem pertahanan balistiknya (BMD) karena: *Adanya tarik-menarik kepentingan antar kekuatan politik di*

---

<sup>21</sup> Meninjau Buku "Stupid White Men", dakam [www.irib.ir](http://www.irib.ir), diakses tanggal 22 April 2007

*internal Amerika Serikat yang menjadikan isu pengembangan BMD untuk memperkuat bergaining politiknya.*

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menjelaskan fenomena secara deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau *library research*. Data didapat dari buku, jurnal, dan internet. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dengan mengikuti model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang menyebutkan bahwa setiap data yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan, direduksi, dikategorikan, disajikan dalam bentuk uraian kemudian disimpulkan.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penelitian ini dibatasi pada masalah dan waktu. Permasalahan yang diteliti hanya pada masalah kebijakan Amerika Serikat dalam mengembangkan sistem pertahanan balistiknya (BMD). Jangkauan waktu dibatasi antara tahun 2000 hingga tahun 2007. Pertimbangannya, pada rentang tahun tersebut, terutama pada tahun 2000 sudah ada niat dari Bush untuk mengembangkan BMD. Sedangkan tahun 2007 adalah mempertimbangkan kemungkinan factor eksternal yang semakin memperkuat AS untuk mengembangkan BMD ditandai dengan semakin banyaknya Negara-negara yang melakukan uji coba peluru kendali seperti negara

Pakistan, India, Iran dan Korea Utara.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penulisan studi hubungan internasional ini disusun secara sistematis mulai dari bab pendahuluan, isi dan penutup dengan perincian sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori yang digunakan untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian, hipotesis, dan sistematika penulisan. Bab II berisi tentang politik luar negeri Amerikat Serikat. Pada bab ini, dijelaskan bagaimana system politik yang ada serta bagaimana proses pengambilan keputusan politik luar negeri dilakukan.

Bab II mendeskripsikan tentang perkembangan BMD. Bab ini membahas tentang perkembangan nuklir Amerika Serikat mulai dari era Reagan, Bush, Clinton, dan Bush Junior. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan bahwa pengembangan BMD pasca tragedi WTC 11 September 2001 adalah bagian dari proses pengembangan teknologi nuklir yang telah dilakukan Amerika Serikat sejak lama.

Bab III mendiskripsikan tragedi WTC 11 September 2001

Bab IV mengkaji faktor-faktor yang mendorong Amerika Serikat untuk mengembangkan BMD dilihat dari situasi internal dan eksternal. Pembahasan sisi internal berusaha mengemukakan alasan-alasan domestik yang menjadi alasan keputusannya mengembangkan BMD dan pihak-pihak

Pembahasan sisi eksternal berusaha mendeskripsikan situasi eksternal Amerika Serikat yaitu situasi politik dunia internasional. Bab ini mengungkap adanya peningkatan pengembangan persenjataan modern, khususnya peluru kendali yang dapat dipasang dengan hulu ledak nuklir, konsekuensi-konsekuensi yang timbul serta bagaimana respon Amerika Serikat terhadap situasi eksternal tersebut.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya.